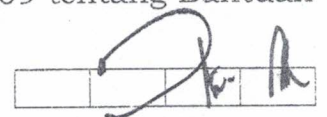
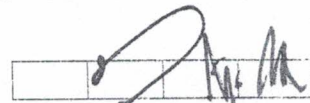


7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

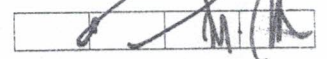
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid-like pattern.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021.**

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 793.430.875.420,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang bersumber dari :

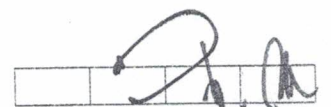
- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 16.002.922.500,- (*Enam Belas Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.096.788.535,- (*Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.477.597.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 577.000.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 216.422.500,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar 3.750.000.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - f. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);



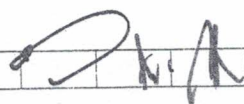
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (*Empat Milyar Rupiah*); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 358.250.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 862.538.535,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 876.000.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
 - b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 73.290.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 240.703.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 15.323.010.058,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*); dan
 - f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 3.840.594.151,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 718.665.174.853,- (*Tujuh Ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :



- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 601.223.342.853,- (*Enam Ratus Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 36.683.360.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*); dan
 - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 80.758.472.000,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*);

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 830.052.413.152,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:

Pasal 9



- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.858.688.947,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 176.956.134.695,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 90.313.963.428,- (*Sembilan Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 33.031.226.323,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.726.504.832,- (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 290.345.226,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 616.600.000,- (*Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 43.955.967.680,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp has a grid-like border and contains some illegible text or a logo.

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 99.149.944.951,- (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.399.810.226,- (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 47.136.983.055,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 568.703.550,- (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
 - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 38.521.206.710,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.058.200.000,- (*Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.535.500.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*).



- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 144.188.947,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 132.464.849.866,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 195.000.081,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.863.389.363,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 58.827.257.795,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 52.538.302.627,- (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 40.900.000,- (*Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 132.266.629.668,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid-like pattern.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.811.352.268,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 130.455.277.400,- (*Seratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

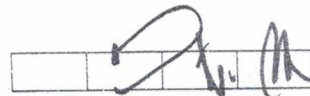
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 69.691.622.140,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp has a grid-like border and contains some illegible text or a logo.



j. Lampiran X

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

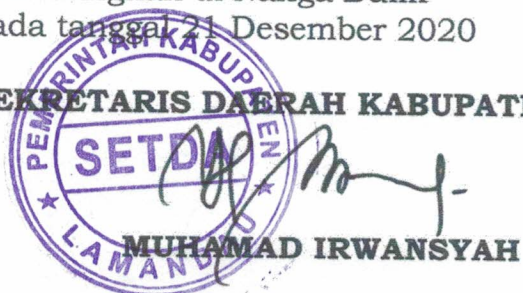
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Desember 2020



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 712



KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.289.082.525
4.1.01	Pajak Daerah	16.002.922.500
4.1.01.06	Pajak Hotel	55.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	12.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	12.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	29.800.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	29.800.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.200.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.200.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	577.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	57.600.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	57.600.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	19.252.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	19.252.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	8.748.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	8.748.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	491.400.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	491.400.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.500.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	480.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	480.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.900.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.900.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.120.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.120.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	216.422.500
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	172.406.520
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	172.406.520
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.015.980
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	40.015.980
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.750.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.750.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.750.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	81.000.000

4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	81.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	93.600.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	93.600.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	42.680.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	42.680.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	132.720.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	132.720.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	4.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.500.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.096.788.535
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	358.250.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	20.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.250.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.250.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	4.000.000
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	4.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	862.538.535

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	553.338.535
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	429.948.535
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	56.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	51.590.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	800.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	2.200.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.200.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	18.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	18.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	282.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	25.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	207.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	876.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	276.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	276.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	600.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	600.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.711.774.281
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.711.774.281
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.711.774.281
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.711.774.281
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.477.597.209
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	73.290.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8.290.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.290.000
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	4.000.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	240.703.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	144.474.000
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	51.974.000
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	92.500.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	96.229.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.229.000
4.1.04.13.02.0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	95.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	15.323.010.058
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	15.323.010.058
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	15.323.010.058
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.840.594.151
4.1.04.20.01	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.840.594.151
4.1.04.20.01.0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.840.594.151
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	742.141.792.895
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.665.174.853
4.2.01.01	Dana Perimbangan	601.223.342.853
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	60.677.979.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	16.886.101.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.512.883.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	53.018.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	29.552.289.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.545.369.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	433.340.075.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	433.340.075.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.490.539.853
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	275.480.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.232.163.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.240.728.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.482.349.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.042.609.853
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.859.248.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.143.620.000
4.2.01.01.03.0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	391.427.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.071.104.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.947.964.000
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	4.700.000.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	12.652.406.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	9.431.441.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.020.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.714.749.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	26.024.966.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	597.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.921.996.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.524.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	303.300.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.426.779.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.020.266.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	596.649.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.756.282.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	977.173.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.096.428.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	36.683.360.000
4.2.01.02.01	DID	36.683.360.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.02.01.0001	DID	36.683.360.000
4.2.01.05	Dana Desa	80.758.472.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	80.758.472.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	80.758.472.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.476.618.042
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.476.618.042
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.476.618.042
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.476.618.042
	Jumlah Pendapatan	793.430.875.420
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	558.920.933.618
5.1.01	Belanja Pegawai	312.934.774.504
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	176.956.134.695
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	131.477.990.082
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	131.477.990.082
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.228.014.132
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.228.014.132
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.584.531.195
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.584.531.195
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.227.899.627
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.227.899.627
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.532.939.829
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.532.939.829
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.681.481.075
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.681.481.075
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.175.995
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	118.175.995
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.621.595
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.621.595
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.513.342.689
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.513.342.689
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	588.138.476

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	588.138.476
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.313.963.428
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	80.040.318.028
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	80.040.318.028
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.322.945.400
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.322.945.400
5.1.01.02.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.936.650.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.936.650.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.050.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.031.226.323
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.087.487.320
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	20.915.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.357.500
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.064.214.820
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	44.257.003
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	4.600.000
5.1.01.03.02.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.087.003
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.435.000
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	30.135.000
5.1.01.03.02.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.03.02.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.02.014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.024.966.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.024.966.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.518.996.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4.518.996.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.355.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	295.740.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.059.780.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.726.504.832
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	951.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	951.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	363.061.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	363.061.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.916.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.916.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.970.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.970.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.450
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.450
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.489.128
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.489.128

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.974
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.974
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.763.953.280
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.763.953.280
5.1.01.04.12.001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.162.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.162.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	290.345.226
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	133.000.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	133.000.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.580.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.580.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.080.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.080.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.332.400
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.332.400
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	256.826
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	256.826
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	665.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	665.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	931.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	931.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.500.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	616.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	415.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	415.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.02.001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.211.409.462
5.1.02.01	Belanja Barang	43.955.967.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.931.602.833
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.423.289.693
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	363.205.832
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.767.357.262
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	385.196.875
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	21.637.500
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	131.123.812
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.865.435.274
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	640.643.150
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	113.779.324
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	44.407.811
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.038.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.207.951.028
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.833.586
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.865.176.497
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	353.344.476
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	221.538.306
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	30.759.750
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.045.948.943
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.970.618.040
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	293.621.859
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.626.085.454
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.944.681.276
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	54.780.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	129.090.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	548.090.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.445.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.126.268.937
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.000.000
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	17.943.198
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	49.612.500
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	538.758.692
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	104.934.125
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	241.227.020
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	3.472.875
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	20.569.818
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	15.710.625
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	21.498.750
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	393.702.750
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	935.130.395
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	174.693.500
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	26.000.000
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.013	Belanja Perkakas Kerja	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.016	Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.023	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	0
5.1.02.01.01.024	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana	0
5.1.02.01.01.025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	0
5.1.02.01.01.026	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	0
5.1.02.01.01.027	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas	0
5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.01.032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.035	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	0
5.1.02.01.01.036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	0
5.1.02.01.01.037	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	24.364.847
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	24.364.847
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.027	Belanja BBG Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.04.006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.05.003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.05.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.001	Belanja Pakaian KORPRI	0
5.1.02.01.07.002	Belanja Pakaian Adat Daerah	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	0
5.1.02.01.07.006	Belanja Pakaian Jas/Safari	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	99.149.944.951
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	71.476.946.973
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.455.570.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.755.250.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.240.100.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.367.472.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.207.358.984
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	262.752.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	140.422.225
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.498.716.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.674.672.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	159.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.716.230.290
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	589.620.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	62.064.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	799.291.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.720.348.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.697.880.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.042.728.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	144.480.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.867.925
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	6.500.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	388.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	42.700.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	7.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	60.250.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	64.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	46.708.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	75.918.375
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	47.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	360.057.600
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	422.262.600
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.553.338.974
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.309.459.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.845.050.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	16.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	642.480.000
5.1.02.02.01.007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.017	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	0
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	0
5.1.02.02.01.044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	0
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	0
5.1.02.02.01.049	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	0
5.1.02.02.01.050	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0
5.1.02.02.01.060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0
5.1.02.02.01.079	Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.084	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.865.177.458
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	997.642.045
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.561.558.880
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.995.396.840
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.097.532
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	67.482.161
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	27.000.000
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.412.943.000
5.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	97.125.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	79.260.000
5.1.02.02.04.0007	Belanja Sewa Compacting Equipment	76.250.000
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	316.470.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	78.050.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	131.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	375.900.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	99.073.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	78.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	81.815.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.108.334.971
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.400.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	393.381.971
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	279.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	7.500.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	33.678.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	392.375.000
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.100.000
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.06.009	Belanja Sewa Alat Kesenian	0
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	8.100.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	134.850.000
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	132.850.000
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.07.008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	0
5.1.02.02.07.009	Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)	0
5.1.02.02.07.010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.115.105.500
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.160.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	25.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.476.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	520.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	21.120.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	92.425.500
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	500.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	152.400.000
5.1.02.02.08.006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	0
5.1.02.02.08.008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0
5.1.02.02.08.014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	0
5.1.02.02.08.016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.347.926.344
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	70.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	125.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	120.000.000
5.1.02.02.09.001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	202.926.344
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	730.000.000
5.1.02.02.09.002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.343.538.705
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	758.400.000
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	112.500.000
5.1.02.02.10.0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	20.000.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	452.638.705
5.1.02.02.10.002	Belanja Sosialisasi	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.10.004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	691.600.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	116.900.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	574.700.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.645.422.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.374.972.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.108.230.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.847.400.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	314.820.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.399.810.226
5.1.02.03.01.001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.426.787.298
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.500.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	4.500.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	80.444.754
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.992.123
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.647.074.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000
5.1.02.03.02.0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	2.675.876
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	138.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	55.428.024
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	44.049.620
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	15.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	56.050.823
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	25.036.780
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	30.125.857
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	273.681.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	16.500.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	90.595.029
5.1.02.03.02.0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	10.000.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	450.000
5.1.02.03.02.036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	70.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	490.740.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	266.390.000
5.1.02.03.02.0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	933.412
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	3.120.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	68.000.000
5.1.02.03.02.064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0
5.1.02.03.02.071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0
5.1.02.03.02.077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	0
5.1.02.03.02.086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0
5.1.02.03.02.096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.02.103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.1.02.03.02.104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	0
5.1.02.03.02.111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0
5.1.02.03.02.116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0
5.1.02.03.02.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0
5.1.02.03.02.410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0
5.1.02.03.02.445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	0
5.1.02.03.02.494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.579.679.628
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.236.060.128
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	343.619.500
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.343.300
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	150.000.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	143.343.300
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.04.026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0
5.1.02.03.04.063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0
5.1.02.03.04.069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0
5.1.02.03.04.071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0
5.1.02.03.04.072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	0
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	0
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.06.004	Belanja Jasa KIR	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	47.136.983.055
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.136.983.055
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.671.384.220
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.915.439.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.409.906.613
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	301.532.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.838.721.222
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.04	Belanja Pemulangan Pegawai	0
5.1.02.04.04.002	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	0
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	568.703.550
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	518.903.550
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.553.550
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	304.700.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	182.650.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.800.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	49.800.000
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0
5.1.02.05.03.001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.03.002	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.05	Belanja Hibah	42.916.060.705
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	560.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	560.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	560.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.521.206.710
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.268.626.348
5.1.05.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	821.028.797
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.447.597.551
5.1.05.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.204.336.562
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.806.646.113
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.397.690.449
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.048.243.800
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	948.300.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	99.943.800
5.1.05.05.05	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.05.001	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.058.200.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	230.400.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	230.400.000
5.1.05.06.01.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...	0
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.827.800.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.827.800.000
5.1.05.06.02.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...	0
5.1.05.06.04.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta ...	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995
5.1.05.07.01.001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...	0
5.1.05.07.01.002	Dst ...	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.858.688.947
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.535.500.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.529.550.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.529.550.000
5.1.06.01.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu...	0
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.950.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.950.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	0
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000
5.1.06.03.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	0
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	144.188.947
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	144.188.947
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	144.188.947
5.1.06.04.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	0
5.2	BELANJA MODAL	132.464.849.866
5.2.01	Belanja Modal Tanah	195.000.081
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	195.000.081
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	195.000.081
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	33.000.081
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	162.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.863.389.363
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.500.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.500.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.500.000
5.2.02.01.03.008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.261.610.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.901.110.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	233.498.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.612.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.825.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	753.000.000
5.2.02.02.01.002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	360.500.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	360.500.000
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0
5.2.02.02.04.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	65.000.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	22.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	22.000.000
5.2.02.03.01.008	Belanja Modal Peralatan Las	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	43.000.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	13.000.000
5.2.02.03.03.001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	30.000.000
5.2.02.03.03.017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	130.884.900
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	130.884.900
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	69.500.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	5.504.900
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	55.880.000
5.2.02.04.01.005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01.008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.427.099.428
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.389.438.949
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	66.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.323.438.949
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.727.787.700
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.289.885.290
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	221.999.800
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	206.902.610
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000
5.2.02.05.02.001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.003	Belanja Modal Alat Pembersih	0
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	309.872.779
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	25.182.504
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	153.690.275
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	131.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	69.929.750
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	65.429.750
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.900.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.529.750
5.2.02.06.01.001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0
5.2.02.06.01.002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.500.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.500.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.394.172.289
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.364.469.215
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.883.037.562
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	176.900.640
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.202.883.085
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	462.868.420

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	639.592.420
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	852.317.000
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	146.870.088
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.029.703.074
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.029.703.074
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	60.000.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	60.000.000
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	60.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.397.836.696
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.563.041.701
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	50.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.024.341.701
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	488.700.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	834.794.995
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	121.995.550
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	710.299.445
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	52.356.300
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	52.356.300
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	52.356.300
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.827.257.795
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	58.613.257.795
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.573.257.795
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.314.828.045
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.584.571.500
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	25.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.294.398.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	181.460.250
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	664.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.040.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	450.000.000
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	400.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	190.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	214.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	214.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	214.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.538.302.627
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.761.258.627
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	36.299.258.627
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	35.849.258.627
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	450.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.462.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.462.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.605.044.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	196.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	196.000.000
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	308.500.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	308.500.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	13.229.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	13.229.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	871.544.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	871.544.000
5.2.04.02.07.0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	0
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	132.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	100.000.000
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	100.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	32.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	32.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	40.000.000
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	40.000.000
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	40.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.900.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	28.900.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	28.900.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	3.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	25.900.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	12.000.000
5.2.05.02.02.0001	Belanja Modal Pahatan	12.000.000
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.400.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	132.266.629.668
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.811.352.268
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.811.352.268
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.811.352.268
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.811.352.268
5.4.01.01.03.001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	0

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	130.455.277.400
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	245.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.210.277.400
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.160.277.400
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.160.277.400
5.4.02.05.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000
	Jumlah Belanja	830.052.413.152
	Total Surplus/(Defisit)	(36.621.537.732)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.063.166.140
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.063.166.140
6.1.01.05	Penghematan Belanja	45.721.537.732
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	45.721.537.732
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	44.586.825.294
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.134.712.438
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.341.628.408
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.341.628.408
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.341.628.408
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	71.063.166.140
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.100.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.100.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.100.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.100.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.100.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.100.000.000
	Pembiayaan Netto	61.963.166.140

SALINAN SESUAI ASLINYA
OLEH KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

ELLY JOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

